



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode 31 Desember 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur penyusunan laporan keuangan dengan basis kas menuju akrual, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang harus disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD, dalam hal ini Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

Selain menyediakan informasi, maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan juga digunakan untuk membandingkan realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan dan sebagai representasi dari seluruh komponen kegiatan pada Kapanewon Depok Sleman dalam satu tahun anggaran sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan anggaran.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas serta basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan.

Tabel 1.1 Laporan Keuangan Kapanewon Depok

Laporan	Basis Penyusunan
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Kas
b. Neraca	Akrual
c. Laporan Operasional (LO)	Akrual
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Akrual
e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	-

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.Neraca yang tersaji dalam laporan ini tertanggal 30 Juni 2023.

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumberdaya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh SKPD untuk kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, yaitu periode Semester 1 2023.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri atas ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada:

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Bupati Nomor 21.1 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Depok Semester I Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

Bab I . Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
 - a. Pendapatan

- b. Belanja
- c. Aset
- d. Kewajiban
- e. Ekuitas Dana

5.2 Pengungkapan Atas Pos-pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrua! Atas Pendapatan, Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas Untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis Akrua! Pada SKPD

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KAPANEWON DEPOK

2.1 Kebijakan Keuangan

Anggaran belanja Kapanewon Depok diupayakan untuk membiayai program dan kegiatan penunjang perangkat daerah, kegiatan yang bersifat esensial dan bernilai produktif untuk peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas belanja kapanewon Depok, kebijakan-kebijakan yang ditempuh antara lain:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam belanja daerah melalui pengendalian terhadap belanja yang tidak menyentuh langsung pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan ketajaman tolok ukur kinerja.
- b. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan antara lain dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap sebulan sekali dan koordinasi seminggu sekali, paparan capaian kinerja kegiatan pada akhir tahun anggaran dan penyampaian laporan tahunan Kapanewon Depok yang didalamnya termuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kapanewon Depok.
- c. Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara konsisten dan konsekuen dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penerapan anggaran berbasis kinerja ini adalah, antara lain:
 - Untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari penggunaan sumberdaya yang terbatas;
 - Mendukung perbaikan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan sumberdaya sehingga tujuan dan indikator kinerja menjadi jelas;
 - Memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam jangka menengah.
- d. Menjamin alokasi belanja daerah dengan memberikan skala prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik.

2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah.

Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kapanewon Depok Kabupaten Sleman tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya

Tingkat capaian kinerja Kapanewon Depok Kabupaten Sleman tahun 2023 untuk seluruh indikator dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

No.	Urusan, Program, kegiatan, Sub kegiatan	Target kinerja	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		
	1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		
	A. Gelar Budaya Jogja	1 Laporan	100.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		
	1. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		
	A. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1 Dokumen	35.000.000
3.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota		
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	A. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	15.609.000
	B. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	2.644.800
	C. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20 Dokumen	2.061.000
	D. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.816.400
	E. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	2.001.000
	F. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	11.140.875
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	A. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	3.287.117.138

No.	Urusan, Program, kegiatan, Sub kegiatan	Target kinerja	Anggaran
	B. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1200 dokumen	68.340.000
	C. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.871.200
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	A. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.440.000
	B. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	13.800.000
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	A. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	76.936.200
	B. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	4.650.000
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	A. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	5.116.000
	B. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	8.786.800
	C. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	9.972.600
	D. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 paket	36.590.650
	E. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	5.703.600
	F. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	3.300.000
	G. Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	7.425.000
	H. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	18.460.000
	I. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	8.275.000
	J. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	1.800.000

No.	Urusan, Program, kegiatan, Sub kegiatan	Target kinerja	Anggaran
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	A. Pengadaan Mebel	2 Paket	27.355.000
	B. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	64.437.810
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	A. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	699.750
	B. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	90.240.000
	C. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Laporan	178.102.000
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	A. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	83.017.600
	B. Pemeliharaan Mebel	4 Unit	3.675.000
	C. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	26.780.000
	D. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	69.265.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
	A. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 laporan	18.272.000
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
	A. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	177.976.660
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
	A. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh	22 Dokumen	175.917.600

No.	Urusan, Program, kegiatan, Sub kegiatan	Target kinerja	Anggaran
	Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
	B. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27 Dokumen	158.911.800
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	A. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	65.344.500
	B. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	15.000.000
	2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
	A. Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	15.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
	A. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	131.361.000
	B. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 orang	9.995.000

No.	Urusan, Program, kegiatan, Sub kegiatan	Target kinerja	Anggaran
	C. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	128.529.260
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	A. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	5.948.850
	B. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	24.975.000
	C. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	5.850.000
	D. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3 Dokumen	14.692.900
	E. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	38.327.100
	F. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	5.995.000
	G. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	7.364.200

BAB III

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kapanewon Depok

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD menurut program dan kegiatan Semester II Tahun 2023 Kapanewon Depok sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100,000,000.00	99,853,750.00	99.85
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100,000,000.00	99,853,750.00	99.85
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	100,000,000.00	99,853,750.00	99.85
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,810,425,127.00	3,676,649,142.00	96.49
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36,273,075.00	34,617,600.00	95.44
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,609,000.00	14,183,800.00	90.87
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,644,800.00	2,569,800.00	97.16
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,061,000.00	2,060,600.00	99.98
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,816,400.00	2,666,400.00	94.67
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2,001,000.00	1,999,000.00	99.90
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,140,875.00	11,138,000.00	99.97
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,004,245,540.00	2,887,886,691.00	96.13
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,932,034,340.00	2,815,857,191.00	96.04
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68,340,000.00	68,340,000.00	100.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,871,200.00	3,689,500.00	95.31
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18,240,000.00	17,939,700.00	98.35
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,440,000.00	4,139,700.00	93.24
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13,800,000.00	13,800,000.00	100.00

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82,337,202.00	79,200,254.00	96.19
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	77,687,202.00	74,980,254.00	96.52
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4,650,000.00	4,220,000.00	90.75
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108,209,650.00	107,223,452.00	99.09
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,034,600.00	6,937,000.00	98.61
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,648,200.00	6,599,500.00	99.27
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,972,600.00	9,972,600.00	100.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36,590,650.00	36,493,152.00	99.73
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,703,600.00	5,703,600.00	100.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,300,000.00	3,045,000.00	92.27
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,425,000.00	10,407,600.00	99.83
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18,460,000.00	18,440,000.00	99.89
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8,275,000.00	7,825,000.00	94.56
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,086,910.00	91,623,875.00	97.38
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	27,355,000.00	26,656,000.00	97.44
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66,731,910.00	64,967,875.00	97.36
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279,478,150.00	273,053,647.00	97.70
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	699,750.00	691,200.00	98.78
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99,840,000.00	96,562,495.00	96.72
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178,938,400.00	175,799,952.00	98.25
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187,554,600.00	185,103,923.00	98.69
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83,017,600.00	82,894,791.00	99.85
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3,675,000.00	3,629,000.00	98.75
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,050,000.00	21,081,800.00	91.46
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77,812,000.00	77,498,332.00	99.60
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	198,282,760.00	194,234,154.00	97.96
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18,272,000.00	18,272,000.00	100.00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18,272,000.00	18,272,000.00	100.00

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	180,010,760.00	175,962,154.00	97.75
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	180,010,760.00	175,962,154.00	97.75
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	395,054,400.00	386,383,375.00	97.81
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	395,054,400.00	386,383,375.00	97.81
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	200,917,600.00	194,647,475.00	96.88
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	194,136,800.00	191,735,900.00	98.76
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	95,344,500.00	94,024,850.00	98.62
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80,344,500.00	79,024,850.00	98.36
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	65,344,500.00	64,024,850.00	97.98
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	287,885,260.00	285,376,620.00	99.13
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	287,885,260.00	285,376,620.00	99.13
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	131,361,000.00	131,284,620.00	99.94
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	9,995,000.00	9,983,000.00	99.88
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	146,529,260.00	144,109,000.00	98.35
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	103,153,050.00	102,914,125.00	99.77

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
7.01.06.2.01	PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	103,153,050.00	102,914,125.00	99.77
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5,948,850.00	5,936,950.00	99.80
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24,975,000.00	24,975,000.00	100.00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5,850,000.00	5,793,475.00	99.03
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14,692,900.00	14,672,500.00	99.86
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	38,327,100.00	38,282,000.00	99.88
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5,995,000.00	5,890,000.00	98.25
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7,364,200.00	7,364,200.00	100.00
Jumlah		5,025,145,097.00	4,874,436,016.00	97.00

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan beberapa hambatan dan kendala yang ditemui diantaranya adalah:

- a. Terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat, ada beberapa kegiatan di Kapanewon yang mengharuskan adanya sinkronisasi dengan Dinas terkait, namun hal ini tidak berjalan akibat kebijakan dari dinas-dinas terkait tersebut.
- b. Terkait dengan Pelayanan Publik di bidang Kependudukan, masih terkendala adanya kekurangan SDM personil dalam pelayanan, hal ini Cenderung membuat waktu tunggu antrian pemohon.
- c. Terkait dengan Dana Keistimewaan, terdapat hambatan adanya penyesuaian standar harga barang jasa yang disesuaikan dengan standar kabupaten sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

Sedangkan entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/ barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) diperlakukan sebagai entitas akuntansi yang terpisah dengan entitas akuntansi yang lain. Untuk itu masing-masing SKPD mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan SKPD.

Pasal 1 Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 menyebutkan bahwa entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Berdasarkan peraturan tersebut, maka BKAD berkedudukan sebagai entitas akuntansi sekaligus entitas pelaporan.

4.2 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023 menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD menggunakan dua basis untuk kebutuhan berbeda, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas digunakan untuk menyusun:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual ini digunakan untuk menyusun:

- a. Neraca

b. Laporan Operasi

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah Pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang diterapkan di Kapanewon Depok atas pos-pos pada laporan keuangan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kas

Kas adalah uang tunai dan/atau yang dapat dipersamakan dengannya serta saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan entitas Pemerintah Daerah.

Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, surat berharga harus segera dapat diubah menjadi kas tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.

➤ Klasifikasi

- Kas terdiri atas:
 - a. Kas di kas daerah
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - d. Kas di Entitas BLUD.
- Setara kas terdiri atas:
 - a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito yang jatuh temponya kurang dari 3 (tiga) bulan
 - b. Surat berharga yang sangat likuid atau jangka waktunya kurang dari 3 (tiga) bulan.

➤ Pengakuan

- Penerimaan kas berasal dari:
 - a. Pendapatan asli daerah
 - b. Dana perimbangan
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah
 - d. Penerimaan pembiayaan
- Penerimaan kas diakui pada saat terjadinya arus masuk kas ke Kas Daerah.
- Pengeluaran kas terdiri dari:
 - a. Belanja

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran kas diakui sebagai belanja jika sudah terjadi pembayaran dari Satuan Kerja kepada pihak ketiga.

Pengeluaran kas dari Kas Daerah ke Satuan Kerja merupakan peralihan aktiva dari entitas pelaporan ke Satuan Kerja, oleh karenanya tidak dianggap sebagai belanja.

Belanja direalisasikan sesuai APBD dengan prosedur pengendalian yang melingkupinya.

➤ **Pengukuran**

- Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nominalnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan keuangan.

➤ **Pengungkapan**

- Pengungkapan kas di CaLK menunjukkan posisi dan rincian kas pada tanggal pelaporan keuangan serta informasi lain terkait kas.

2. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

➤ **Klasifikasi**

- Persediaan diklasifikasikan antara lain:
 - a. Barang pakai habis
 - b. Barang tak pakai habis
 - c. Amunisi
 - d. Bahan untuk pemeliharaan
 - e. Suku cadang
 - f. Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga
 - g. Pita cukai dan leges
 - h. Bahan baku
 - i. Barang dalam proses/setengah jadi
 - j. Barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

➤ **Pengakuan**

- Persediaan diakui pada saat:
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan dapat diukur dengan andal
 - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

➤ **Pengukuran**

- Persediaan disajikan di neraca sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian dikurangi dengan potongan harga, rabat, dan sejenisnya
 - b. Biaya standar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya, dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan
 - d. Persediaan hewan dan tanaman, dinilai dengan menggunakan nilai perolehan
 - e. Persediaan barang cetakan, dinilai sebesar biaya cetak
 - f. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP)
 - g. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki pada kegiatan swakelola tidak dimasukkan sebagai persediaan dalam kelompok acara lancar, tetapi dibebankan ke rekening aset tetap yaitu Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - h. Penjelasan lain yang relevan

3. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak termasuk dalam pengertian aset tetap adalah aset yang nilainya relatif kecil, mudah rusak, dan/ atau tidak memerlukan biaya pemeliharaan.

➤ **Klasifikasi**

- Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, terdiri atas:
 - a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai
 - b. Peralatan dan mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan, alat elektronik, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai

Peralatan dan mesin terdiri dari:

- 1) alat-alat besar
 - 2) alat-alat angkutan
 - 3) alat-alat bengkel dan alat ukur
 - 4) alat-alat pertanian/peternakan
 - 5) alat-alat kantor dan rumah tangga
 - 6) alat studio dan komunikasi
 - 7) alat-alat kedokteran
 - 8) alat-alat laboratorium
 - 9) alat-alat keamanan
- c. Gedung dan bangunan
- Mencangkup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dann dalam kondisi siap pakai
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan
- e. Aset tetap lainnya
- Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai
- Aset tetap lainnya antara lain:
- Buku perpustakaan
 - Barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - Hewan ternak serta tanaman
- f. Konstruksi dalam pengerjaan

➤ **Pengakuan**

- Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh nilainya dapat diukur secara handal dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
 - f. Merupakan nilai obyek pemeliharaan atau memerlukan biaya atau ongkos untuk pemeliharaan
 - g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan

- h. Telah diterima hak kepemilikannya
- i. Pengeluaran yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai penambahan, pengembangan, dan penggantian utama dibebankan pada periode pengeluaran tersebut

➤ **Pengukuran**

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, yaitu harga beli dan biaya lain yang dapat dilekatkan secara langsung sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Biaya yang dapat dilekatkan secara langsung pada aset tetap tersebut siap digunakan, antara lain:
 - a. Biaya persiapan tempat
 - b. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*), biaya simpan, dan bongkar muat (*handling cost*)
 - c. Biaya pemasangan (*instalation cost*)
 - d. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur
 - e. Biaya perijinan
 - f. Biaya konstruksi
- Jika terdapat pengeluaran biaya langsung untuk pengadaan beberapa aset tetap, maka metode pelekatan yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang dengan rumus harga satuan aset dibagi total pengadaan dikali biaya yang dilekatkan.
- Apabila biaya perolehan tidak memungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Apabila harga perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiahnya ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat perolehan.
- Apabila diperoleh secara gabungan, biaya perolehan masing-masing aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar/harga taksiran masing-masing aset yang bersangkutan
- Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dilaporkan sebagai aset tetap di neraca.
- Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru.
- Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Gedung dan bangunan dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- b. Peralatan dan mesin dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- c. Jalan, irigasi, dan jaringan dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

➤ **Pengungkapan**

- Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan mutasi aset tetap lainnya;
 - 1) Penambahan
 - 2) Pengurangan/pelepasan
 - 3) Perubahan nilai, jika ada
 - c. Informasi penyusutan, meliputi;
 - 1) Nilai penyusutan
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan
 - 3) Masa manfaat
 - 4) Tarif penyusutan yang digunakan
 - 5) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
 - d. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap
 - e. Kebijakan akuntansi untuk kapasitas aset tetap
 - f. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi
 - g. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap
 - h. Informasi penting lain yang relevan
- Pengeluaran setelah perolehan aset tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa mendatang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan
- Pengeluaran belanja tidak dikapitalisasi pada nilai aset jika hanya untuk mempertahankan fungsi atau mempertahankan umur ekonomis aset tetap. Pengeluaran belanja pemeliharaan dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Gedung dan bangunan dengan belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dilakukan kapitalisasi apabila pengukuran belanja digunakan untuk:

- 1) Meningkatkan kapasitas (menambah luas/volume)
 - 2) Memperpanjang umur teknis (memperkuat dan/atau mengganti struktur fondasi, strukturdinding, dan/atau struktur atap, atau
 - 3) Meningkatkan kualitas/mutu (mengganti dengan kualitas yang lebih baik
- b. Peralatan dan mesin dengan nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan Rp 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah), dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk:
- 1) Menambah fungsi
 - 2) Mengubah fungsi
 - 3) Menambah asesoris/ komponen peralatan
- c. Jalan, irigasi, dan jaringan dengan nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk:
- 1) Meningkatkan kapasitas (menambah luas/ volume)
 - 2) Meningkatkan kualitas
- Penghentian dan pelepasan aset tetap (retirement and disposal).
 - Aset tetap dieliminasi ketika dilepaskan atau dihapuskan atau dihentikan penggunaannya secara permanen atau tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Aset tetap yang dieliminasi direklasifikasi ke akun aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - Penyusutan aset tetap
Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable aset*) selama masa manfaatnya.
 - Nilai penyusutan setiap periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - Aset tetap lainnya tidak dilakukan penyusutan secara periodek, melainkan diterapkan penghapusan jika aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan lagi.
 - Aset tetap yang telah habis masa manfaatnya/ habis nilai bukunya, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai aset tetap tersebut dibebankan pada periode tahun berkenaan.
 - Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Alat angkut darat bermotor	7

2.	Alat pemeliharaan tanaman	4
3.	Alat kantor	5
4.	Alat rumah tangga	5
5.	Peralatan komputer	4
6.	Meja dan kursi kerja/ rapat pejabat	5
7.	Alat studio	5
8.	Alat komunikasi	5
9.	Alat keamanan dan perlindungan	5
10.	Bangunan gedung tempat kerja	50

- Penilaian kembali aset tetap

Penilaian kembali aset tetap dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini terjadi penyimpangan dari konsep biaya perolehan yang berpengaruh terhadap keuangan suatu entitas, selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas dana diinvestasikan pada aset tetap.

4. Aset lainnya

- Aset lainnya terdiri atas:
 - a. Tagihan jangka panjang
 - b. Kemitraan dengan pihak ketiga
 - c. Aset tak berwujud

yaitu aset yang tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Jenis-jenis aset tak berwujud:
 - a. Goodwill
 - b. Lisensi
 - c. Hak paten
 - d. Royalti
 - e. Aset tak berwujud lainnya
 - f. Aset tak berwujud dalam pengerjaan yaitu pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan keuangan
 - 1) Software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu sehingga dapat digunakan di komputer lain

- 2) Hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yaitu suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa yang akan datang serta dapat diidentifikasi sebagai aset.

- **Aset lain-lain**

Digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud.

Termasuk dalam kelompok aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif. Penghentian dapat disebabkan karena rusak berat, usang dan/ atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses penghapusan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, dan penyertaan modal).

➤ **Pengungkapan**

- Aktiva Tak Berwujud, diakui ketika memenuhi kriteria:

- a. Dapat diidentifikasi

- 1) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibeda secara jelas, dengan aset-aset yang lain pada suatu entitas, sehingga dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama
- 2) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya

- b. Pengendalian

Suatu entitas disebut mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.

- c. Manfaat ekonomi masa depan

Manfaat ekonomi dapat menghasilkan aliran kas masuk, setara kas, barang atau jasa ke pemerintah daerah.

- Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

➤ **Pengukuran**

- Aktiva Tak Berwujud

Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan:

- a. Masa manfaat dan metode amortisasi
 - b. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa
 - c. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan.
 - Aset lain-lain
- Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan pemberhentian penggunaan dan informasi lainnya yang relevan.

5. Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aktiva tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluarnya aliran sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

- Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah
 - b. Keharusan membayar kembali penerimaan pembiayaan yang berasal dari utang dalam negeri.

- Klasifikasi

Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka panjang.

- a. Kewajiban jangka pendek

Yaitu kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan, terdiri atas:

- 1) Utang kepada pihak ketiga, berasal dari kontrak yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan
- 2) Utang bunga
- 3) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), yaitu utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya
- 4) Bagian lancar utang jangka panjang
- 5) Utang jangka pendek lainnya, yaitu kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada

b. Kewajiban jangka panjang

➤ **Pengakuan**

Kewajiban diakui pada saat konsekuensi ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut membuat pemerintah daerah harus mengeluarkan sumber daya kepada pihak ketiga.

➤ **Pengukuran**

- Kewajiban disajikan di neraca sebesar nilai nominal yaitu jumlah rupiah yang akan dibayarkan
- Kewajiban valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal pelaporan keuangan.

➤ **Pengungkapan**

- Kewajiban diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar penjadualan utang.
- Informasi-informasi yang disajikan dalam CaLK adalah:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan perjanjian utang
 - b. Jumlah saldo kewajiban pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaiannya kewajiban sebelum jatuh tempo.

7. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan keuangan.

➤ **Klasifikasi**

Ekuitas diklasifikasikan sebagai berikut:

- Ekuitas
- R/K PPKD
- R/K SKPD

➤ **Pengakuan**

- Ekuitas diakui saat terjadi transaksi sebagai akibat penerapan model desentralisasi akuntansi keuangan daerah
- R/K PPKD digunakan oleh Satuan Kerja, untuk mencatat:
 - a. Sisi debet: setoran uang ke kas daerah dan/atau penyerahan aset non kas ke Pemerintah Daerah

- b. Sisi kredit: penerimaan otorisasi pencairan kas dari SKPD dan/ atau penerimaan aset non kas dari Pemerintah Daerah
- R/K SKPD digunakan oleh SKPD, untuk mencatat:
 - a. Sisi debet: penerbitan otorisasi pencairan kas dan/atau penyerahan aset non kas ke Satuan Kerja
 - b. Sisi kredit: penerimaan setoran uang dan/atau penerimaan aset non kas dari Satuan Kerja
- R/K PPKD dan R/K SKPD dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian.
- **Pengukuran**
Ekuitas disajikan sebesar selisih antara aset dan kewajiban.
- **Pengungkapan**
Pengungkapan ekuitas dalam CaLK memuat informasi lainnya terkait posisi ekuitas pada tanggal pelaporan keuangan.

8. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

- **Klasifikasi**
Pendapatan-LRA diklasifikasikan sesuai dengan struktur APBD dan SAP.
- **Pengakuan**
Pendapatan-LRA diakui pada saat kas telah diterima oleh Bendahara Penerimaan Satuan Kerja atau Bendahara Penerimaan BLUD atau kas daerah.
- **Pengukuran**
 - Akuntansi Pendapatan-LRA dicatat dengan asas bruto, yaitu sebelum dikompensasi dengan pengeluaran
 - Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan
 - Pendapatan-LRA dalam mata uang asing dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia
- **Pengungkapan**
 - Pendapatan disajikan sesuai dengan struktur APBD dan SAP
 - Rincian lebih lanjut jenis pendapatan tahun bersangkutan apabila terjadi hal-hal yang bersifat khusus

- Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya

9. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

➤ **Klasifikasi**

Belanja diklasifikasikan sesuai dengan struktur APBD dan SAP.

➤ **Pengakuan**

- Pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah untuk pembayaran langsung oleh pihak ketiga
- Pada saat dilakukan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja

➤ **Pengukuran**

Belanja dicatat berdasarkan asas bruto sesuai dengan dokumen pengeluaran yang sah.

➤ **Pengungkapan**

- Belanja disajikan sesuai dengan struktur APBD dan SAP
- Rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam CaLK
- Penjelasan mengenai sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya.

10. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

➤ **Klasifikasi**

Pendapatan-LO diklasifikasikan sesuai dengan SAP.

➤ **Pengakuan**

PAD

- Retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha diakui ketika kas telah diterima oleh Bendahara Penerimaan berdasarkan laporan harian, kecuali retribusi sejenis dengan pendapatan
- Lain-lain PAD yang sah diakui ketika kas telah diterima oleh Bendahara Penerimaan, kecuali pendapatan sejenis dengan penetapan atau dokumen lain yang dipersamakan
- Pendapatan BLUD dari jasa layanan diakui ketika kas telah diterima oleh Bendahara Penerimaan.

➤ **Pengukuran**

- Pendapatan-LO dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu sebelum dikompensasi dengan pengeluaran
- Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatn dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan
- Pendapatan-LO dalam mata uang asing dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

➤ **Pengungkapan**

- Rincian pendapatan-LO sesuai dengan SAP
- Penjelasan mengenai pendapatan tahun pelaporan jika terjadi hal-hal yang bersifat khusus
- Penjelasan sebab-sebab selisih pencapaian target penerimaan pendapatan daerah dengan realisasinya
- Informasi lain yang dianggap perlu.

11. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

➤ **Klasifikasi**

Beban diklasifikasikan sesuai dengan SAP.

➤ **Pengakuan**

- Saat timbulnya kewajiban:
 - a. Beban pegawai melalui mekanisme LS diakui setelah diterbitkan otorisasi pencairan kas gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan beban pegawai melalui sistem UP/GU/TU diakui ketika kas dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran
 - b. Beban barang dan jasa diakui ketika Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa ditandatangani oleh Panitia Penerima Barang
 - c. Beban langganan diakui saat tagihan atas beban tersebut disahkan, atau
- Saat terjadinya konsumsi aset, atau
 - a. Beban penyusutan diakui saat akhir bulan
 - b. Beban penyusutan dimulai pada bulan berkenaan jika pendapatan aset dilakukan sampai dengan tanggal 15 atau dimulai pada bulan berikutnya jika pengadaan aset dilakukan setelah tanggal 15
 - c. Beban amortisasi diakui saat akhir periode penyusunan laporan keuangan.

- Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Beban tak terduga diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengeluaran belanja tak terduga
 - b. Belanja persediaan diakui pada saat digunakan.

➤ **Pengukuran**

- Beban diukur berdasarkan harga perolehan atas:
 - a. Besaran timbulnya kewajiban, atau
 - b. Besaran terjadinya konsumsi aset, atau
 - c. Besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- Jika tidak diperoleh harga perolehan digunakan nilai wajar.

➤ **Pengungkapan**

Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam LO dan rincian lebih lanjut jenis beban diungkapkan dalam CaLK.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

(Terlampir)

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB VII

PENUTUP

Demikian beberapa Catatan Atas Laporan Keuangan yang dapat Kami sampaikan semoga dapat membantu dalam mengevaluasi laporan keuangan dan kinerja Kapanewon Depok. Semoga dengan Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memperjelas pemahaman dari isi laporan yang kami sampaikan.

Depok, Desember 2023
Panewu Depok,

Wawan Widianoro, S.IP, MPA
NIP. 19711009 199903 1 005

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

APBD Kabupaten Sleman disusun menggunakan basis kas sehingga Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun menggunakan basis kas. Dengan basis tersebut, maka pengakuan pos-pos dalam LRA adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan satuan kerja atau Bendahara BLUD;
- b. Transfer diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Daerah dan/atau pada saat dilakukan pembayaran oleh bendahara pengeluaran satuan kerja;
- c. Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah dan/atau bendahara pengeluaran.

5.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih(Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
2	Pendapatan Transfer	-	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-

Pendapatan – LRA merupakan pendapatan yang diakui pada saat terjadi arus kas masuk yang menambah kekayaan daerah.

5.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	\		-	-
Jumlah	\	-	-	-

Pemungutan PAD selalu berdasarkan pada Peraturan Daerah. Anggaran dan Realisasi dari komponen PAD adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih(Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pajak Daerah	-	-	-	-
2.	Retribusi Daerah			-	-
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
4.	Lain-lain PAD yang Sah			-	-
Jumlah		-	-	-	0.00

5.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

5.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
			-	-
Jumlah	-	-	-	-

Pendapatan Retribusi Daerah diperoleh dari beberapa komponen sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih(Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	-	-	-	-
	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA	-	-	-	-
Jumlah					-

5.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

5.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari beberapa komponen sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih(Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi - LRA	-	-	-	-
	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LRA	-	-	-	
	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA	-	-	-	
	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA	-	-	-	
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	-	-	
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	
	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	0.00

5.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

5.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

5.2 Belanja Daerah

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih(Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Operasi	4,909,658,002	4,762,383,141	(147,274,861)	4,584,339,117
2.	Belanja Modal	115,487,095	112,052,875	(3,434,220)	144,538,740
3.	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
4.	Belanja Transfer	-	-	-	-
	Jumlah	5,025,145,097	4,874,436,016	(150,709,081)	4,728,877,857

5.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	4,909,658,002.00	4,762,383,141	(147,274,861.00)	4,584,339,117
Jumlah	4,909,658,002.00	4,762,383,141.00	(147,274,861.00)	4,584,339,117.00

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Sleman yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih(Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	3,014,174,340.00	2,897,997,191.00	(116,177,149.00)	3,126,822,259.00
2	Belanja Barang & Jasa	1,895,483,662.00	1,864,385,950.00	(31,097,712.00)	1,457,516,858.00
3	Belanja Bunga	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	-	-	-	-
6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah	4,909,658,002.00	4,762,383,141.00	(147,274,861.00)	4,584,339,117.00

5.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	3,014,174,340.00	2,897,997,191	(116,177,149.00)	3,126,822,259.00
Jumlah	3,014,174,340.00	2,897,997,191.00	(116,177,149.00)	3,126,822,259.00

Realisasi belanja pegawai dengan rincian berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih(Kurang)	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,565,713,820.00	1,529,375,691.00	-	1,695,532,925.00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1,146,371,100.00	1,144,577,920.00		1,281,489,960.00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	107,800,000.00	106,033,960.00		106,747,996.00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	80,180,000.00	75,910,000.00		80,720,000.00
	Belanja Tunajngan Fungsional PNS	-			44,100,000.00
	Belanja Tunajngan Fungsional Umum PNS	38,500,000.00	31,105,000.00		

	Belanja Tunjangan Beras PNS		69,957,720.00	65,612,520.00		69,088,680.00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		4,200,000.00	5,837,975.00		4,437,973.00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS		25,000.00	15,350.00		18,312.00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		108,000,000.00	90,934,750.00		98,510,719.00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		2,760,000.00	2,337,030.00		2,604,808.00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		7,920,000.00	7,011,186.00		7,814,477.00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		1,462,500,000.00	1,279,481,500.00	(183,018,500.00)	538,378,334.00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS		585,000,000.00	512,912,500.00		538,378,334.00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS		877,500,000.00	766,569,000.00		810,771,000.00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		-	-		-
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		82,140,000.00	82,140,000.00	-	82,140,000.00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		62,040,000.00	62,040,000.00		62,040,000.00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		6,300,000.00	6,300,000.00		6,300,000.00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		13,800,000.00	13,800,000.00		13,800,000.00
	Jumlah		3,110,353,820.00	2,890,997,191.00	(219,356,629.00)	2,316,051,259.00

5.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	1,895,483,662.00	1,864,385,950.00	(31,097,712.00)	1,383,805,858.00
Jumlah	1,895,483,662.00	1,864,385,950.00	(31,097,712.00)	1,383,805,858.00

Realisasi belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian		Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih(Kurang)	Realisasi 2022
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Belanja Barang Habis Pakai		721,157,860.00	716,460,532.00		513,389,315.00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		49,477,600.00	49,219,710	(257,890)	45,564,903.00
	BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI		232,600.00	232,600	-	
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas		820,000.00	820,000	-	425,000.00
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		324,000.00	-	(324,000)	
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		25,498,750.00	25,103,452	(395,298)	40,262,200.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		4,735,200.00	4,669,000	(66,200)	
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		40,904,210.00	40,485,900	(418,310)	28,535,480.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		4,500,000.00	4,824,000.00	324,000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		15,071,500.00	12,883,700	(2,187,800)	500,000.00
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		5,116,000.00	6,937,000	1,821,000	5,690,720.00
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata		13,400,000.00	13,400,000	-	5,200,000.00
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya		8,596,000.00	11,796,000	3,200,000	12,104,700.00
	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat		13,247,000.00	13,247,000	-	650,000.00
	Belanja Natura Dan Pakan-Natura		20,655,000.00	20,635,000	(20,000)	20,259,500.00
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		472,990,000.00	466,789,420	(6,200,580)	335,331,812.00
	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu		13,500,000.00	13,398,000	(102,000)	15,500,000.00
	Belanja Pakaian Paskibraka		30,250,000.00	30,219,750	(30,250)	
	Belanja Pakian Teknik		1,840,000.00	1,800,000	(40,000)	3,365,000.00
2	Belanja Jasa Kantor		673,818,000.00	682,262,995	(4,724,905.00)	546,082,019.00
	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia		196,500,000.00	184,450,000	(12,050,000)	164,060,000.00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		72,020,000.00	72,000,000	(20,000)	71,850,000.00
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		1,237,500.00	1,237,500		
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan		45,000,000.00	36,750,000		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		85,558,500.00	88,677,648	3,119,148	
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum				-	54,689,424.00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		88,636,800.00	88,546,404	(90,396)	78,589,018.00
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		88,825,200.00	87,253,548	(1,571,652)	90,005,778.00

	Belanja Lembur				-	
	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan		500,000.00	320,500	(179,500)	387,200.00
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah		1,200,000.00	1,044,120	(155,880)	947,100.00
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan		2,000,000.00	2,000,000	-	
	Belanja Tagihan Telepon		4,800,000.00	1,680,698	(3,119,302)	800,983.00
	Belanja Tagihan Listrik		78,000,000.00	87,707,977	9,707,977	75,696,616.00
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		3,300,000.00	3,045,000	(255,000)	2,940,000.00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan		6,240,000.00	6,129,700	(110,300)	6,115,900.00
	Belanja Paket/Pengiriman		23,000,000.00	21,419,900	(1,580,100)	
3	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin		52,528,200.00	68,193,000	15,664,800.00	39,330,000.00
	Belanja Sewa Electric Generating Set		3,009,400.00	1,350,000	(1,659,400)	450,000.00
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		8,900,000.00	8,900,000	-	17,490,000.00
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		600,000.00	600,000	-	
	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat		460,000.00	460,000	-	
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		24,584,300.00	38,675,000	14,090,700	13,185,000.00
	Belanja Sewa Mebel		6,716,500.00	6,675,000	(41,500)	4,065,000.00
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio		8,258,000.00	11,533,000	3,275,000	4,140,000.00
4	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya		1,800,000.00	-		
	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian		1,800,000	-		1,350,000.00
5	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin		65,795,000.00	59,936,091	(5,858,909)	71,609,024
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set		1,500,000.00	1,500,000	-	1,331,500.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		28,500,000.00	28,478,891	(21,109)	26,750,824.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua		6,840,000.00	6,746,400	(93,600)	4,714,000.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik		600,000.00	600,000	-	200,000.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)		4,000,000.00	3,417,100	(582,900)	3,957,700.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor		2,000,000.00	1,300,000	(700,000)	2,000,000.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel		3,675,000.00	3,629,000	(46,000)	9,465,000.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		4,800,000.00	4,740,000	(60,000)	4,800,000.00
	Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studioperalatan studio video dan film		1,500,000.00	1,400,000	(100,000)	3,555,000.00
	Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studioperalatan studio gambar		2,000,000.00	-	(2,000,000)	
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		4,380,000.00	3,565,000	(815,000)	7,840,000.00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		3,000,000.00	1,999,700	(1,000,300)	5,000,000.00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya		3,000,000.00	2,560,000	(440,000)	1,995,000.00
6	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan		69,265,000.00	69,090,332.00	(136,668.00)	29,795,500.00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		59,265,000.00	59,128,332	(136,668)	29,795,500.00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman		10,000,000.00	9,962,000	(38,000)	6,866,000.00
7	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi		10,968,000.00	10,968,000.00	-	0.00
	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi		2,560,000.00	2,560,000.00	-	0.00
	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya		8,408,000.00	8,408,000.00	-	0.00
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		211,220,000.00	213,540,000	2,320,000.00	152,100,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		211,220,000.00	213,540,000	2,320,000	152,100,000.00
9	Belanja Uang Pihak Ketiga		42,150,000.00	42,150,000	-	31,500,000.00
	Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan		42,150,000.00	42,150,000	-	31,500,000.00

Jumlah	1,837,734,060.00	1,851,632,950	7,264,318.00	1,383,805,858.00
--------	------------------	---------------	--------------	------------------

5.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	115,487,095.00	-	(115,487,095.00)	144,538,740.00
Jumlah	115,487,095.00	-	(115,487,095.00)	144,538,740.00

Realisasi Belanja Modal terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	-	-		-
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104,487,095.00	101,052,875.00	(3,434,220.00)	144,538,740.00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	0.00	-	33,573,160.00
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11,000,000.00	0.00	(11,000,000.00)	38,874,000.00
	Jumlah	115,487,095.00	101,052,875.00	(14,434,220.00)	216,985,900.00

5.2.2.1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
			-	-
Jumlah	-	-	-	-

5.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	104,487,095.00	101,052,875.00	(3,434,220.00)	-
Jumlah	104,487,095.00	101,052,875.00	(3,434,220.00)	-

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104,487,095.00	101,052,875.00	(3,434,220.00)	28,500,000.00
	Belanja Modal Alat Pendingin	26,563,410.00	25,308,000.00	(1,255,410.00)	28,500,000.00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			-	14,370,000.00
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	38,238,685.00	45,789,400.00	7,550,715.00	17,007,740.00
	Belanja Modal Peralatan Studio Lainnya	9,000,000.00			
	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone			-	2,799,000.00
	Belanja Modal Personal Computer			-	15,920,000.00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya			-	23,762,000.00
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3,330,000.00	3,299,475.00	(30,525.00)	2,630,000.00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya			-	910,000.00
	Belanja Modal Mebel	27,355,000.00	26,656,000.00	(699,000.00)	38,640,000.00

51.2.5 Surplus Defisit

Surplus Defisit	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan	-	-	-	
Belanja	5,025,145,097.00	4,874,436,016.00	150,709,081.00	
Surplus/defisit	(5,025,145,097.00)	(4,874,436,016.00)	150,709,081.00	-

5.3 NERACA

5.3.1 Aset

Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah (Berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Jumlah	7,283,201,075.81	7,545,806,950.89	(262,605,875.08)

Saldo aset tersebut terdiri atas:

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Aset Lancar	21,073,116.47	78,314,670.00	(57,241,553.53)
2	Investasi Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00
3	Aset Tetap	7,238,158,804.30	7,439,513,421.91	(201,354,617.61)
4	Dana Cadangan		0.00	0.00
5	Aset Lainnya	23,969,155.04	27,978,858.98	(4,009,703.94)
	Jumlah	7,283,201,075.81	7,545,806,950.89	(262,605,875.08)

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah (Berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	21,073,116.47	78,314,670.00	(57,241,553.53)
Jumlah	21,073,116.47	78,314,670.00	(57,241,553.53)

Saldo aset lancar Kapanewon Depok per 30 Juni dan 31 Desember 2022 terdiri atas:

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kas dan Setara Kas	-	0.00	0.00
2	Investasi Jangka Pendek	-	-	-
3	Piutang Pajak	-	-	-
4	Piutang Retribusi	2,554,560.00	2,554,560.00	-
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
6	Piutang lain-lain PAD yang sah	-	-	-
7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-
8	Piutang Transfer Antar Daerah	-	-	-
9	Piutang Lainnya	0.00		0.00
10	Penyisihan Piutang	(2,554,560.00)	(2,554,560.00)	-
11	Beban Dibayar di Muka	-	-	-
12	Persediaan	21,073,116.47	78,314,670.00	(57,241,553.53)
	Jumlah	21,073,116.47	78,314,670.00	-

5.3.1.1. a Kas

Kas dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	-	-	-
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
3	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
4	Kas di BLUD	-	-	-
5	Kas Dana BOS	-	-	-
6	Kas Dana Kapitalisasi pada FKTP	-	-	-
7	Kas Lainnya	-	-	-
8	Setara Kas	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

5.3.1.1. b Piutang Retribusi

Piutang Retribusi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Piutang Bruto	2,554,560.00	2,554,560.00	-
Penyisihan Piutang	(2,554,560.00)	(2,554,560.00)	-
Piutang Netto	-	-	-

Adapun rincian per jenis piutang retribusi sebagai berikut:

No.	Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Khusus		0.00	0.00
2.	Piutang Retribusi Sampah		0.00	0.00
3.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		0.00	0.00
4.	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga		0.00	0.00
5.	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		0.00	0.00
6.	Piutang Retribusi Izin Gangguan	2,554,560.00	2,554,560.00	0.00
7.	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		0.00	0.00
8.	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair		0.00	0.00
	Jumlah	2,554,560.00	2,554,560.00	0.00

No.	Jenis	Piutang Bruto	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Khusus		0.00	0.00

2.	Piutang Retribusi Sampah		0.00	0.00
3.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		0.00	0.00
4.	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga		0.00	0.00
5.	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		0.00	0.00
6.	Piutang Retribusi Izin Gangguan	2,554,560.00	2,554,560.00	0.00
7.	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		0.00	0.00
8.	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair		0.00	0.00
Jumlah		2,554,560.00	2,554,560.00	0.00

5.3.1.1. c **Persediaan**

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan disajikan di neraca sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian dikurangi dengan potongan harga, rabat dan sejenisnya.
- Biaya standar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar yaitu harga pasar yang berlaku pada saat penilaian.
- Persediaan dinilai dengan menggunakan MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama).
- Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.

Pada Tahun 2017 telah dilakukan perubahan kebijakan akuntansi persediaan untuk:

- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar diganti dengan menggunakan nilai perolehan.
- Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir diganti dengan Masuk Pertama Keluar Pertama – MPKP.

Terhadap perubahan kebijakan tersebut telah diperhitungkan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi sebagaimana tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai persediaan merupakan persediaan yang masih tersisa per 30 Juni 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Sediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Barang Pakai Habis				
1	Bahan	-	-	-

2	Suku Cadang	-	-	-
3	Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor	21,073,116.47	78,264,920.00	(57,191,803.53)
4	Obat-obatan	-	-	-
5	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
6	Natura dan Pakan	-	49,750.00	(49,750.00)

Mutasi persediaan per jenis persediaan terlampir pada **Lampiran Rekapitulasi Kartu Persediaan**

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah (Berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	7,238,158,804.29	7,439,513,421.91	(201,354,617.62)
Jumlah	7,238,158,804.29	7,439,513,421.91	(201,354,617.62)

Nilai aset tetap yang dimiliki per tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan & Mesin	2,294,716,701.03	2,252,578,926.5	42,137,774.50
3	Gedung & Bangunan	8,019,945,622.7	8,012,465,622.7	7,480,000.00
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	222,580,050.0	222,580,050.0	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(3,299,083,569.45)	(3,048,111,177.33)	- 250,972,392.12
	Jumlah	7,238,158,804.29	7,439,513,421.91	(201,354,617.62)

Rincian mutasi aset selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama	31 Des 2022 (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	Peralatan dan Mesin	2,252,578,926.53	123,109,243.00	80,971,468.50	2,294,716,701.03
1	Alat Besar	-	-	-	-
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	664,897,650.00	21,411,368.00	-	686,309,018.00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00
4	Alat Pertanian	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,003,333,209.53	54,335,250.00	24,656,016.00	1,033,012,443.53
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	76,373,240.00	28,961,800.00	25,560,000.00	79,775,040.00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1,970,000.00	-	-	1,970,000.00
8	Alat Laboratorium	-	-	-	-
9	Senjata Api	900,000.00	-	-	900,000.00
10	Komputer	487,604,827.00	18,400,825.00	30,755,452.50	475,250,199.50
	Gedung dan Bangunan	8,012,465,622.71	7,480,000.00	-	8,019,945,622.71
1	Bangunan Gedung	5,935,438,000.37	7,480,000.00		5,942,918,000.37
2	Monumen	2,043,454,462.34	-		2,043,454,462.34
3	Bangunan Menara	-	-	-	-
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	33,573,160.00	-		33,573,160.00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
1	Jalan dan Jembatan	-			-
2	Bangunan Air/Irigasi	-			-
3	Instalasi				-
4	Jaringan				-
	Aset Tetap Lainnya	222,580,050.00	-	-	222,580,050.00
1	Bahan Perpustakaan				-

2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	222,580,050.00		-	222,580,050.00
3	Hewan	-	-		
4	Biota Perairan	-	-		-
5	Tanaman	-			
6	Barang Koleksi non Budaya	-	-		
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-		
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	52,874,000.00
20	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
		52,874,000.00			52,874,000.00
21	aset lain-lain		80,971,468.50		80,971,468.50
	Total	10,540,498,599.24	211,560,711.50	80,971,468.50	10,671,087,842.24

- Aset Tetap tersebut telah dilakukan penyusutan.
- Nilai Penyusutan setiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- Aset Tetap Lainnya tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan jika Aset Tetap Lainnya tersebut tidak dapat digunakan lagi.
- Aset Tetap yang telah habis masa manfaatnya/habis nilai bukunya, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai aset tetap tersebut dibebankan pada periode tahun berkenaan.
- Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan estimasi masa manfaat.
- Kebijakan aset tetap tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah yang direvisi dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014.

Hasil perhitungan penyusutan aset tetap semester II tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah Harga (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
	Peralatan dan Mesin	2,294,716,701.03	1,877,064,130.55	417,652,570.48
1	Alat Besar	-		-
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	686,309,018.00	498,661,773.62	187,647,244.38
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	16,000,000.00	16,000,000.00	-
4	Alat Pertanian	1,500,000.00	1,406,250.00	93,750.00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,033,012,443.53	894,525,505.01	138,486,938.52
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	79,775,040.00	47,465,043.67	32,309,996.33
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1,970,000.00	1,357,000.00	613,000.00
8	Alat Laboratorium	-	-	-
9	Senjata Api	900,000.00	900,000.00	-
10	Komputer	475,250,199.50	416,748,558.25	58,501,641.25
	Gedung dan Bangunan	8,019,945,622.71	1,422,019,438.61	6,597,926,184.10
1	Bangunan Gedung	5,942,918,000.37	1,254,377,059.81	4,688,540,940.56
2	Monumen	2,043,454,462.34	165,795,855.00	1,877,658,607.34
3	Tugu/ Titik Kontrol	33,573,160.00	1,846,523.80	31,726,636.20
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
1	Jalan dan Jembatan	-	-	-
2	Bangunan Air/Irigasi	-	-	-
3	Instalasi	-	-	-
4	Jaringan	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	222,580,050.00	-	222,580,050.00
1	Buku dan Perpustakaan	-	-	-
2	Barang Bercorak Kebudayaan	222,580,050.00	-	222,580,050.00
3	Hewan dan Ternak serta Tanaman	-	-	-
4	Aset Tetap Renovasi	-	-	-

	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
1	Konstruksi dalam Pengerjaan			-
				-
	Jumlah	10,537,242,373.74	3,299,083,569.16	7,238,158,804.58

5.3.1.3. a Tanah

Tanah	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah (Berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Jumlah	-	-	-

Kecamatan Depok tidak mempunyai aset berupa tanah.

5.3.1.3. b Peralatan Dan Mesin

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah (Berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	2,294,716,701.03	2,252,578,926.53	42,137,774.50
Jumlah	2,294,716,701.03	2,252,578,926.53	42,137,774.50

Kebijakan akuntansi peralatan dan mesin sebagai berikut:

1. Peralatan dan mesin dinilai berdasarkan harga perolehan yaitu harga beli dan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai peralatan dan
2. Pengeluaran belanja tidak dikapitalisasi pada nilai aset jika hanya untuk mempertahankan fungsi atau mempertahankan umur ekonomis aset tetap.
3. Peralatan dan mesin dengan nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk:
 - a. Menambah fungsi;
 - b. Mengubah fungsi; atau
 - c. Menambah asesoris/komponen peralatan.

Atas nilai peralatan dan mesin dapat diungkap sebagai berikut.

- 1) Penambahan peralatan dan mesin pada Tahun 2023 adalah yang berasal dari sumber berikut:
 - a) Penambahan peralatan dan mesin dari dropping BKAD yang terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total (Rp)	Keterangan
1	Sepeda Motor	1	21,411,368.00	21,411,368.00	
	Jumlah Total			21,411,368.00	

Pengadaan sendiri peralatan dan mesin selain berasal dari belanja modal APBD juga berasal dari:

- (1) Pembelian aset dari belanja modal terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total	Keterangan
	Peralatan dan Mesin				
1	Air Conditioner	3	8,436,000	25,308,000	
2	Kursi Kerja	24	799,000	19,176,000	
3	Partisi Ruangan	1	7,480,000	7,480,000	
				51,964,000	

5.3.1.3. c Gedung dan Bangunan

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Gedung Bangunan Kantor	8,019,945,622.71	8,012,465,622.71	7,480,000.00
	JUMLAH	8,019,945,622.71	8,012,465,622.71	7,480,000.00

5.3.1.3. d Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)
1	Barang Bercorak Kebudayaan	222,580,050.00	222,580,050.00	-
	Jumlah	222,580,050.00	222,580,050.00	0.00

Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)
1	Barang Bercorak Kebudayaan			
	Seperangkat gamelan	222,580,050.00	222,580,050.00	-
	Jumlah	222,580,050.00	222,580,050.00	0.00
	Total	222,580,050.00	222,580,050.00	0.00

5.3.1.3. e Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan dihitung dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, dengan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
	Aset Tetap	
	Peralatan dan Mesin	
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	8
3	Alat-Alat Bantu	7
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
12	Alat Pengolahan Pertanian	4
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
14	Alat Kantor	5
15	Alat Rumah Tangga	5
16	Peralatan Komputer	4
17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
18	Alat Studio	5
19	Alat Komunikasi	5
20	Peralatan Pemancar	10
21	Alat Kedokteran	5
22	Alat Kesehatan	5
23	Unit-Unit Laboratorium	8
24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
31	Senjata Api	10
32	Persenjataan Non Senjata Api	3
33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
	Gedung dan Bangunan	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
3	Bangunan Menara	40
4	Bangunan Bersejarah	50
5	Tugu Peringatan	50
6	Candi	50
7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
8	Tugu Peringatan Lain	50
9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
10	Rambu-Rambu	50
11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50

	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	Jalan	10
2	Jembatan	50
3	Bangunan Air Irigasi	50
4	Bangunan Air Pasang Surut	50
5	Bangunan Air Rawa	25
6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	10
8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
9	Bangunan Air Kotor	40
10	Bangunan Air	40
11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
12	Instalasi Air Kotor	30
13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
16	Instalasi Gardu Listrik	40
17	Instalasi Pertahanan	30
18	Instalasi Gas	30
19	Instalasi Pengaman	20
20	Jaringan Air Minum	30
21	Jaringan Listrik	40
22	Jaringan Telepon	20
23	Jaringan Gas	30

5.3.1.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya terdiri dari :

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Pengurangan) (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	-	-	
	- Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	
	- Tagihan ganti Rugi	-	-	
2	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	
3	Aset Tak Berwujud	63,874,000.00	52,874,000.00	11,000,000.00
4	Aset lain-lain	80,971,468.50	-	80,971,468.50
	Akumulasi Amortisasi	(40,259,538.46)	(24,581,641.02)	(15,677,897.44)
	Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	80,616,775.00	(313,500.00)	80,930,275.00
JUMLAH		185,202,705.04	27,978,858.98	157,223,846.06

5.3.1.4. Aset Tak Berwujud

Nilai aset tak berwujud merupakan nilai perolehan untuk pengadaan Aset Tak Berwujud yang terdiri dari software dan kajian. Atas nilai software tersebut telah dilakukan penghitungan amortisasi. Adapun rincian sebagai berikut:

1. Software terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai Software (Rp)	Akumulasi Amortisasi Aset (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Software	63,875,000.00	(40,259,538.46)	23,615,461.54
Jumlah		63,875,000.00	(40,259,538.46)	23,615,461.54

5.3.1.4. Aset Lain-Lain/Barang Rusak

Aset Lain-Lain/Barang Rusak	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah (Berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	80,971,468.50	-	80,971,468.50

Aset lain lain/barang rusak tersebut dengan nilai akumulasi penyusutan yang merupakan akumulasi penyusutan aset tetap dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud yang direklas ke aset lain lain karena sudah rusak, tidak digunakan atau tidak ditemukan saat sensus aset tetap. Aset lain lain tidak diperhitungkan beban penyusutannya.

No.	Uraian	Harga (Rp)	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Aset lain-lain	80,971,468.50	80,616,775.00	354,693.50
	Jumlah	80,971,468.50	80,616,775.00	354,693.50

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Jumlah	-	-	-

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo kewajiban jangka pendek per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri atas:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-
2	Utang Bunga	-	-	-
3	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-	-
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-
5	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-
6	Utang Belanja	-	-	-
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-
Jumlah		-	-	-

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Ekuitas	7,544,981,377.57	7,545,806,950.89	(825,573.32)
Jumlah	7,544,981,377.57	7,545,806,950.89	(825,573.32)

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah per tanggal 31 Desember 2023. Komponen ekuitas terdiri atas Ekuitas Awal, Surplus Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2023

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

5.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, yaitu periode 1 Januari - 31 Desember 2023. Pengakuan pendapatan maupun beban dalam LO menggunakan basis akrual.

5.4.1 Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan – LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan – LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD atau realisasi penerimaan kas di kasda, tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD atau penerimaan yang tidak melalui rekening Kas Daerah.

Pada Tahun 2023 Pendapatan – LO dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	-	0.00	-
Jumlah		0.00	0.00	-

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	0.00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	-	0.00	-
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	0.00
4.	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
Jumlah		-	-	-

5.4.1.1. 1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Wajib Pajak belum memenuhinya. Berikut rincian penerimaan pendapatan pajak daerah berdasarkan jenis transaksi selama Tahun 2022:

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Dalam jumlah realisasi Pendapatan Pajak - LO tersebut di atas termasuk pendapatan pajak per 30 Juni 2023 masih berupa piutang pajak dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

5.4.1.1.

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
		3,996,050.00	(3,996,050.00)
Jumlah	-	3,996,050.00	(3,996,050.00)

Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih retribusi yang sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 Wajib Retribusi belum memenuhi kewajibannya. Realisasi penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah dapat dirinci berdasarkan jenis transaksi sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO	-	0.00	-
	Pemberian Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada Orang Pribadi - LO		0.00	-
	Jumlah	-	0.00	-

Pendapatan retribusi yang masih berupa piutang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Kapanewon Depok			
	Piutang Retribusi Izin Gangguan	0.00	0.00	0.00
	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00	0.00

5.4.1.1. 4 Lain-lain PAD Yang Sah

Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah terdiri atas:

Lain-lain PAD Yang Sah	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
	0.00	0.00	-
Jumlah	0.00	-	-

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI - LO	0.00	0.00	-
	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	0.00	0.00	0.00
	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil - LO	0.00	0.00	0.00
	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	0.00	0.00	0.00
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0.00	0.00	0.00
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00
	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	0.00	-
	Jumlah	0.00	0.00	-

5.4.2 Beban

Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah atau bendahara pengeluaran.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri atas beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Beban Pegawai	2,897,997,191.00	3,126,822,259.00	(228,825,068.00)
2	Beban Barang dan Jasa	1,921,627,503.53	1,457,064,288.00	464,563,215.53
3	Beban Bunga	-	-	-

4	Beban Subsidi	-	-	-
5	Beban Hibah	-	-	-
6	Beban Bantuan Sosial	-	-	-
7	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
Jumlah		4,819,624,694.53	4,583,886,547.00	235,738,147.53

Dari jumlah Beban Operasi tersebut, terdapat beban yang masih terhutang per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1.	Beban Pegawai	2,897,997,191.00	3,126,822,259.00	(228,825,068.00)
2.	Beban Jasa	1,921,627,503.53	1,457,064,288.00	464,563,215.53
Jumlah		4,819,624,694.53	4,583,886,547.00	235,738,147.53

5.4.2.1. 2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa diakui untuk beban-beban sebagai berikut:

No.	SKPD	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
	Beban Barang Habis Pakai	773,702,085.53	528,981,745.00	244,420,340.53
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	162,000.00	350,000.00	(188,000.00)
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	49,219,710.00	45,564,903.00	3,654,807.00
3	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0.00	245,000.00	(245,000.00)
	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	300,000.00		
4	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	820,000.00	425,000.00	395,000.00
5	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat bengkel	232,600.00	-	232,600.00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19,547,235.53	10,195,043.00	9,352,192.53
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11,986,580.00	13,727,422.00	(1,740,842.00)
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39,497,400.00	25,960,480.00	13,536,920.00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	910,000.00	1,090,000.00	(180,000.00)
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	15,733,100.00	17,531,325.00	(1,798,225.00)
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	10,630,600.00	13,009,650.00	(2,379,050.00)
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7,329,860.00	5,177,360.00	2,152,500.00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	67,134,000.00	3,515,000.00	63,619,000.00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	8,900,000.00	5,200,000.00	3,700,000.00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,131,080.00	-	1,131,080.00
16	Beban Obat-Obatan-Obat	0.00	150,000.00	(150,000.00)
17	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7,276,000.00	-	7,276,000.00
18	Beban Natura dan Pakan-Natura	20,684,750.00	20,208,750.00	476,000.00
19	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	-	-	-
20	Beban Makanan dan Minuman Rapat	466,789,420.00	335,331,812.00	131,457,608.00
21	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	13,398,000.00	15,500,000.00	(2,102,000.00)
22	Beban Pakaian Teknik	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
23	Beban Pakaian Paskibraka	30,219,750.00	15,800,000.00	14,419,750.00
	Beban Jasa Kantor	682,262,995.00	546,082,019.00	76,773,576.00
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan	184,450,000.00	164,060,000.00	20,390,000.00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	72,000,000.00	71,850,000.00	150,000.00
3	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	36,750,000.00		
4	Beban Jasa Tenaga Administrasi	88,677,648.00	-	88,677,648.00
5	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum		54,689,424.00	(54,689,424.00)
6	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	88,546,404.00	78,589,018.00	9,957,386.00
7	Beban Jasa Tenaga Keamanan	87,253,548.00	90,005,778.00	(2,752,230.00)
8	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	320,500.00	387,200.00	(66,700.00)
9	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1,237,500.00		
10	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1,044,120.00	947,100.00	97,020.00
11	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2,000,000.00	-	2,000,000.00
12	Beban Tagihan Telepon	1,680,698.00	800,983.00	879,715.00
13	Beban Tagihan Listrik	87,707,977.00	75,696,616.00	12,011,361.00
14	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3,045,000.00	2,940,000.00	105,000.00
15	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6,129,700.00	6,115,900.00	13,800.00
16	Beban Paket/Pengiriman	21,419,900.00		
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	68,193,000.00	39,330,000.00	27,803,000.00
1	Beban Sewa Electric Generating Set	1,350,000.00	450,000.00	900,000.00
2	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8,900,000.00	17,490,000.00	(8,590,000.00)
3	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	600,000.00		
4	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	38,675,000.00	13,185,000.00	25,490,000.00
5	Beban Sewa Mebel	6,675,000.00	4,065,000.00	2,610,000.00
6	Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat	460,000.00		
7	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	11,533,000.00	4,140,000.00	7,393,000.00
	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	1,785,000.00	1,350,000.00	435,000.00
1	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	1,785,000.00	1,350,000.00	435,000.00
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59,936,091.00	73,809,024.00	(15,172,933.00)
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar -Alat bantu Elektrik Generating Set	1,500,000.00	1,331,500.00	168,500.00
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	28,478,891.00	26,750,824.00	1,728,067.00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6,746,400.00	4,714,000.00	2,032,400.00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	-	-	-
5	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	600,000.00	200,000.00	400,000.00
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	3,417,100.00	3,957,700.00	(540,600.00)

7	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor		2,000,000.00	(2,000,000.00)
8	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Linnya	1,300,000.00		
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3,629,000.00	9,465,000.00	(5,836,000.00)
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4,740,000.00	4,800,000.00	(60,000.00)
11	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1,400,000.00	3,555,000.00	(2,155,000.00)
12	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Audio Lainnya		2,200,000.00	(2,200,000.00)
13	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3,565,000.00	7,840,000.00	(4,275,000.00)
14	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya		-	-
15	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1,999,700.00	5,000,000.00	(3,000,300.00)
16	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2,560,000.00	1,995,000.00	565,000.00
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	69,090,332.00	29,795,500.00	32,428,832.00
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	59,128,332.00	29,795,500.00	29,332,832.00
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	9,962,000.00	6,866,000.00	3,096,000.00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	213,540,000.00	152,100,000.00	14,190,000.00
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0.00	47,250,000.00	(47,250,000.00)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	213,540,000.00	152,100,000.00	61,440,000.00
	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	42,150,000.00	31,500,000.00	10,650,000.00
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	42,150,000.00	31,500,000.00	10,650,000.00

5.4.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amotisasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	85,106,326.84	150,023,760.34	(64,917,433.50)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	78,253,225.24	159,844,952.54	(81,591,727.30)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7,380,615.38	14,761,230.76	(7,380,615.38)
	Jumlah	170,740,167.46	324,629,943.64	(153,889,776.18)

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	49,092,788.31	46,034,021.42	3,058,766.89
1	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0.01	0.00	0
2	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	33,165,571.44	33,165,571.42	0
3	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15,927,216.86	12,868,450.00	3,058,767
	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	375,000.00	375,000.00	-
1	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	375,000.00	375,000.00	-
	Beban Penyusutan Alat Kantor	17,598,118.83	19,581,346.17	(1,983,227)
1	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6,290,280.00	6,232,990.00	57,290
2	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	11,307,838.83	13,348,356.17	(2,040,517)
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	51,545,327.77	34,416,369.60	17,128,958
1	Beban Penyusutan Mebel	14,815,566.67	7,725,321.25	7,090,245
2	Beban Penyusutan Alat Pembersih	585,000.00	780,000.00	(195,000)
3	Beban Penyusutan Alat Pendingin	17,120,887.40	9,333,783.20	7,787,104
4	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19,023,873.70	16,577,265.15	2,446,609
	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	518,475.00	691,300.00	(172,825)
1	Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	518,475.00	691,300.00	(172,825)
	Beban Penyusutan Alat Studio	3,751,148.00	1,540,000.00	1,160,150
1	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	2,700,150.00	1,540,000.00	1,160,150
	Beban Penyusutan Studio Video Dan Film	1,050,998.00	37,629.00	1,013,369
	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	559,800	93,300.00	466,500
1	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	559,800	93,300	466,500
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	394,000.00	394,000.00	-
1	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	394,000.00	394,000.00	-
	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	-	-	-
1	Beban Penyusutan Alat Keamanan	-	-	-
	Beban Penyusutan Komputer Unit	33,869,318.00	32,479,323.75	1,389,994
1	Beban Penyusutan Komputer Jaringan	5,974,780.00	5,974,780.00	-
2	Beban Penyusutan Personal Computer	27,894,538.00	26,504,543.75	1,389,994

	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	6,826,731.84	14,381,470.40	(7,554,739)
1	Beban Penyusutan Peralatan Mainframe	213,892.00	213,892.00	-
2	Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer	1,773,467.50	8,703,448.00	(6,929,981)
3	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	4,839,372.34	4,959,997.07	(120,625)
4	Beban Penyusutan Peralatan Jaringan		504,133.33	(504,133)
	Jumlah	164,530,707.75	149,892,831.34	13,493,578

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	115,998,935.85	118,304,400.10	(2,305,464.25)
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	62,998,415.85	65,303,880.10	(2,305,464.25)
2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	53,000,520.00	53,000,520.00	-

	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	40,869,089.26	40,869,089.24	0.02
1	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	40,869,089.26	40,869,089.24	0.02
	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	671,463.20	671,463.20	-
1	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	671,463.20	671,463.20	-
	JUMLAH	157,539,488.31	159,844,952.54	(2,305,464)

Beban Penyusutan Kemitraan dengan pihak Ketiga

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Beban Penyusutan Kemitraan dengan pihak Ketiga	-		
1	Beban Penyusutan Kemitraan dengan pihak Ketiga -bangun guna serah/bangun serah guna	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	15,677,897.44	14,761,230.76	916,667
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	15,677,897.44	14,761,230.76	916,667
	JUMLAH	15,677,897.44	14,761,230.76	916,666.68

5.4.2.1. 8 Beban Amortisasi

Beban Amortisasi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
	7,380,615.38	14,761,230.76	(7,380,615.38)
Jumlah	7,380,615.38	14,761,230.76	(7,380,615.38)

5.4.2.1. 9 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

5.4.4 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
	(5,157,372,788.53)	(4,908,516,490.64)	(248,856,298)
Jumlah	(5,157,372,788.53)	(4,908,516,490.64)	(248,856,297.89)

Surplus/Defisit LO merupakan nilai surplus/defisit dari kegiatan operasional.

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas	30 Juni 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Ekuitas Awal	7,545,806,950.89	7,703,838,875.06	(158,031,924.17)
Surplus/Defisit-LO	(5,157,372,788.53)	(4,908,516,490.64)	(248,856,297.89)
RK PPKD	4,895,592,486.76	4,750,484,566.47	145,107,920.29
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	-	-	(358,906.65)
Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	(1,139,073)	-	(1,139,073)
Lain-lain	313,500	(466,667)	780,167
Ekuitas Akhir	7,283,201,075.80	7,545,340,284.22	(262,139,208.42)

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal merupakan saldo ekuitas akhir Tahun 2022

5.6.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO Tahun 2023 sebesar Rp. 5.157.372.788.53 merupakan Surplus LO tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan:			
Pendapatan Asli Daerah	-	-	Rp -
Pendapatan Transfer	-		
Lain-lain Pendapatan yang sah	-		
Jumlah Pendapatan LO	-	-	-
Beban:			
Beban Operasi	4,819,624,694.53	4,583,886,547.00	Rp 235,738,147.53
Beban Penyusutan	337,748,094.00	324,629,943.64	
Jumlah Beban	5,157,372,788.53	4,908,516,490.64	235,738,147.53
Surplus	(5,157,372,788.53)	(4,908,516,490.64)	235,738,147.53
Defisit dari Kegiatan Non Operasional:			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			

		(5,157,372,788.53)	(4,908,516,490.64)	235,738,147.53
	Beban luar Biasa			
	Surplus LO	(5,157,372,788.53)	(4,908,516,490.64)	(248,856,297.89)

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar untuk mencatat terjadinya koreksi dari pencatatan pada neraca tahun sebelumnya. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Koreksi tambah		
	lain-lain		
	Jumlah	-	
2	Koreksi kurang		
	Jumlah		
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		-	

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2023